



**DINAS PERHUBUNGAN**



**KABUPATEN PESISIR SELATAN**

# LAPORAN EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

## (RKPD)



**TRIWULAN II**

**TAHUN ANGGARAN 2020**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan kasih sayang-Nya dalam memberikan kekuatan sehingga Laporan Evaluasi Hasil Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020, kondisi Triwulan II ini dapat disusun dan diselesaikan sebagaimana yang diharapkan.

Dengan selesainya Laporan Evaluasi Hasil Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) ini, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyelesaian laporan ini.

Semoga laporan ini dapat menjadi pedoman bagi penyusunan dokumen perencanaan daerah dan perangkat daerah serta menjadi bagian dari upaya untuk mewujudkan sinergi langkah-langkah kebijakan, program/kegiatan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Pesisir Selatan.

Kami sadar bahwa laporan ini sangat sederhana dan masih banyak kekurangan. Demi kelancaran program dan kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan pada masa yang akan datang, kami berharap masukan dan saran yang sifatnya membangun untuk perbaikan dan kebaikan kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan kedepannya.

Pasir, 03 Juli 2020  
Kepala Dinas Perhubungan  
Kabupaten Pesisir Selatan



**CHIVA W. N. S.Sos. M.Si**  
NIP. 197002041991011002

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar .....	i
Daftar Isi .....	ii
<b>BAB I. Pendahuluan .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Landasan Hukum .....	3
1.3 Maksud dan Tujuan .....	4
1.4 Metodeologi .....	5
1.5 Sistematika Penulisan .....	6
<b>BAB II. Capaian Target Kinerja dan Penyerapan Dana Program / Kegiatan .....</b>	<b>7</b>
2.1 Anggaran Belanja .....	7
2.2 Pencapaian Target Kinerja APBD pada Lingkup Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan .....	8
<b>BAB III. Evaluasi Terhadap Hasil Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020 .....</b>	<b>11</b>
3.1 Evaluasi Terhadap Hasil Rencana Kerja Perangkat Daerah .....	11
3.2 Hambatan dan Kendala dalam Pencapaian Target Kinerja yang Telah Ditetapkan .....	16
<b>BAB IV. Penutup .....</b>	<b>17</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah adalah Dokumen perencanaan Tahunan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Yang merupakan penjabaran Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah, mengacu pada Rencana Kerja Dinas Perhubungan yang memberikan gambaran tentang program dan kegiatan yang akan dikerjakan oleh perangkat Daerah dalam satu tahun anggaran untuk menjawab pertanyaan apa yang menjadi tujuan, sasaran peningkatan pelayanan, target capaian kinerja, serta sebagaimana program dan pelayanan perangkat daerah sesuai tupoksinya.

Sebagai dokumen rencana tahunan yang merupakan penjabaran Perangkat daerah, Renja Dinas Perhubungan mempunyai arti yang Strategis dalam mendukung penyelenggaraan Program tahunan Pemerintah Daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra ) Instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
2. Rancangan Rencana Kerja merupakan acuan Perangkat Daerah untuk memasukan program kegiatan kedalam KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2020.
3. Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program / kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercatat dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah pada tahun 2020.

Mengingat arti strategis dokumen Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah harus

mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan jangka Panjang Daerah. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Perangkat disusun dengan tahapan :

- a. Persiapan Penyusunan
- b. Penyusunan rancangan awal
- c. Penyusunan rancangan
- d. Perumusan rancangan akhir
- e. Penetapan

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, telah dibentuk tim penyusun Laporan Evaluasi Hasil Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020.

Tim yang dibentuk telah melakukan evaluasi yang meliputi realisasi pencapaian target kegiatan, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi. Evaluasi RKPD yang dilakukan bertujuan untuk melihat perkembangan hasil pelaksanaan RKPD dan keselarasan antara APBD dengan RKPD serta memberikan panduan kepada Pemerintah Daerah dalam menyusun rancangan kebijakan.

Evaluasi RKPD triwulan II Tahun Anggaran 2020 didasarkan kepada pencapaian kinerja pembangunan sampai dengan kondisi 30 Juni 2020. Sebagai dokumen evaluasi perencanaan pembangunan tahunan selama tahun berjalan, diharapkan hasil evaluasi ini dapat menjadi acuan dalam penyusunan RKPD Tahun 2021.

## 1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Laporan Evaluasi Hasil Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020, kondisi Triwulan II ini dilandasi dasar hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2030;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021, yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020;
14. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 37 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020;

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Maksud dan tujuan dari Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2020 adalah untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian target rencana program dan kegiatan prioritas daerah, sebagaimana tercantum dalam RKPD Tahun 2020, guna :

- a. Menjamin bahwa prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program/kegiatan prioritas daerah, indikator kinerja, dan pagu indikatif dalam RKPD telah dipedomani dalam penyusunan rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) sebagai landasan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2020.
- b. Menilai daya serap capaian target kinerja program/kegiatan, mencakup masukan (*input*), keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) yang telah ditetapkan dalam dokumen RKPD Tahun 2020 dan RPJMD Tahun 2016-2021.

- c. Memastikan perkembangan hasil pelaksanaan RKPD Tahun 2020 dan keselarasan antara RKPD dengan APBD Tahun 2020.
- d. Memperoleh gambaran capaian target kinerja dan pendanaan RKPD Tahun 2020.
- e. Mengidentifikasi permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan RKPD Tahun 2020, yang merupakan tahun ke-4 dari pelaksanaan RPJMD Tahun 2016-2021.
- f. Merumuskan rekomendasi dan saran tindak lanjut untuk dipergunakan sebagai masukan dalam peningkatan kinerja pembangunan daerah.

#### 1.4 Metodeologi

Metodeologi yang digunakan dalam pelaksanaan penyusunan evaluasi RKPD ini yaitu dengan menghitung capaian kinerja program dan kegiatan dengan menggunakan kategori *interval* nilai realisasi kinerja program dan kegiatan sampai dengan triwulan berkenaan. Penggunaan kategori interval ini akan membantu pengklasifikasian penilaian realisasi kinerja program dan kegiatan berdasarkan target rencana program dan kegiatan prioritas daerah. Kategori interval yang digunakan adalah sebagai berikut :

#### Kriteria Penilaian dan Interval Nilai Realisasi Kinerja Evaluasi Hasil RKPD

No.	Kriteria Penilaian	Simbol	Interval Nilai
1	Sangat Tinggi	ST	$91\% \geq 100\%$
2	Tinggi	T	$76\% \leq 90\%$
3	Sedang	S	$66\% \leq 75\%$
4	Rendah	R	$51\% \leq 65\%$
5	Sangat Rendah	SR	$\leq 50\%$



## **1.5. Sistematika Penulisan**

Laporan Evaluasi Hasil Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020 kondisi Triwulan II disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- BAB I : Pendahuluan, mencakup Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, Metodeologi serta Sistematika Penulisan Laporan Evaluasi Hasil Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020.
- BAB II : Capaian Target Kinerja dan Penyerapan dana Program / kegiatan, menjelaskan tentang Capaian Target Kinerja, dan Pencapaian Target Kinerja APBD pada Lingkup Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan.
- BAB III : Evaluasi Terhadap Hasil Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020, menjelaskan tentang Evaluasi Terhadap Hasil Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Hambatan/ Kendala Dalam Pencapaian Target Kinerja Yang Telah ditetapkan.
- BAB IV : Penutup

**BAB II**  
**CAPAIAN TARGET KINERJA DAN**  
**PENYERAPAN DANA PROGRAM / KEGIATAN**

**2.1 Anggaran Belanja**

Pada tahun 2020 Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan mendapat belanja baik belanja tidak langsung maupun belanja langsung sejumlah Rp. 13.000.579.183,-. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat Pada Tabel 2.1 berikut ini:

**Tabel 2.1**  
**Uraian Belanja Langsung dan Tidak Langsung**  
**Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan**  
**Tahun 2020**

<b>NO</b>	<b>URAIAN</b>	<b>JUMLAH ANGGARAN</b>
<b>1</b>	<b>Belanja Tidak Langsung</b>	<b>Rp. 4.429.188.737,-</b>
	Belanja Pegawai	Rp. 4.429.188.737,-
<b>2</b>	<b>Belanja Langsung</b>	<b>Rp. 8.571.390.446,-</b>
	Belanja Pegawai	Rp. 615.050.000,-
	Belanja Barang & Jasa	Rp. 7.146.527.576,-
	Belanja Modal	Rp. 809.812.870,-
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>Rp. 13.000.579.183,-</b>

Namun dengan adanya kondisi yang luar biasa menimpa Indonesia pada umumnya atau Kabupaten Pesisir Selatan pada khususnya yaitu terjadinya pandemi Corona Virus 19 (Covid-19) yang berdampak pada perekonomian, sehingga perlu melakukan penyesuaian/ refocusing anggaran. Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan terdapat beberapa kegiatan yang tidak dapat dilanjutkan dan beberapa kegiatan terkena efisiensi anggaran. Berikut dapat dilihat anggaran belanja Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan setelah dilakukan refocusing anggaran :

**Tabel 2.2**  
**Uraian Belanja Langsung dan Tidak Langsung**  
**Setelah Refocusing Anggaran**  
**Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan**  
**Tahun 2020**

No	Uraian	Anggaran Sebelum Pergeseran	Anggaran Setelah Pergeseran	Selisih +/-
1	<b>Belanja Tidak Langsung</b>	Rp. 4.429.188.737,-	Rp. 4.213.379.071,-	Rp. (215.809.666,-)
	Belanja Pegawai	Rp. 4.429.188.737,-	Rp. 4.213.379.071,-	Rp. (215.809.666,-)
2	<b>Belanja Langsung</b>	Rp. 8.571.390.446,-	Rp. 7.289.813.420,-	Rp. (1.281.577.026,-)
	Belanja Pegawai	Rp. 54.000.000,-	Rp. 54.000.000,-	Rp. 0,-
	Belanja Barang & Jasa	Rp. 7.707.577.576,-	Rp. 6.452.864.950,-	Rp. (1.254.712.626,-)
	Belanja Modal	Rp. 809.812.870,-	Rp. 782.948.470,-	Rp. (26.864.400,-)
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	Rp. 13.000.579.183,-	Rp. 11.503.192.491,-	Rp. (1.497.386.692,-)

## 2.2 Pencapaian Target Kinerja APBD pada Lingkup Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan

Memuat penjelasan mengenai keberhasilan pencapaian target kinerja dari pelaksanaan program/kegiatan unit kerja sesuai dengan tupoksinya. Disamping itu, juga perlu dijelaskan faktor pendorong dan faktor penghambat dalam mewujudkan tingkat efisiensi dan efektifitas, baik itu faktor yang bisa dikendalikan maupun yang tidak bisa dikendalikan seperti force majeure.

### Ikhtisar Pencapaian Target Kinerja Keuangan Triwulan II Tahun Anggaran 2020

Adapun ikhtisar pencapaian target kinerja keuangan kondisi sampai dengan 30 Juni 2020 Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan dapat dilihat sebagai berikut :

No	Program/ Kegiatan	Belanja Langsung		
		Anggaran	Realisasi	%
A	PROG. PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	498.751.532,-	259.311.545,-	51,99
1.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	108.000.000,-	53.290.644,-	49,34
2.	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	190.435.000,-	78.035.000,-	40,98
3.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	41.188.232,-	20.188.232,-	49,01

4.	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	8.333.000,-	3.350.000,-	40,20
5.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	11.990.906,-	6.783.953,-	56,58
6.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	15.328.093,-	6.851.692,-	44,70
7.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan	3.989.693,-	3.217.556,-	80,65
8.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4.960.000,-	1.970.000,-	39,72
9.	Penyediaan Makanan dan Minuman	15.706.240,-	11.939.400,-	76,02
10.	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	45.637.900,-	38.850.400,-	85,13
11.	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	20.375.000,-	20.375.000,-	100,00
12.	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	13.000.000,-	6.000.000,-	46,15
13.	Penunjang Operasional Perencanaan dan Pelaporan	19.807.468,-	8.459.668,-	42,71
<b>B</b>	<b>PROG. PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>	<b>231.370.000,-</b>	<b>113.349.900,-</b>	<b>48,99</b>
14.	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	231.370.000,-	113.349.900,-	48,99
<b>C</b>	<b>PROG. PENINGKATAN PELAYANAN ANGKUTAN</b>	<b>938.098.190,-</b>	<b>468.393.165,-</b>	<b>49,93</b>
15.	Pemilihan dan Pemberian Penghargaan Bidang Perhubungan	6.464.450,-	6.464.450,-	100,00
16.	Pengawasan dan Pengendalian LLAJ	93.010.000,-	45.296.500,-	48,70
17.	Pengawasan dan Pengendalian Lalu Lintas Angkutan Laut	65.364.100,-	28.051.000,-	42,91
18.	Operasional Transportasi Pelayanan Pendidikan	263.539.800,-	131.201.757,-	49,78
19.	Pelayanan Terminal dan Perparkiran	64.504.840,-	34.495.400,-	53,48
20.	Pelayanan Pemungutan Retribusi Daerah	445.215.000,-	222.884.058,-	50,06
<b>D</b>	<b>PROG. PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA PERHUBUNGAN</b>	<b>0,-</b>	<b>0,-</b>	<b>0</b>
21.	Pembangunan Fasilitas Transportasi Pedesaan (Penunjang DAK)	0,-	0,-	0
<b>E</b>	<b>PROG. PENINGKATAN DAN PENGAMANAN LALU LINTAS</b>	<b>5.299.293.598,-</b>	<b>3.919.080.733,-</b>	<b>73,95</b>
22.	Pengadaan dan Pemasangan Penerangan Jalan Umum	643.135.600,-	643.135.600,-	100,00
23.	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Penerangan Jalan Umum	4.356.157.998,-	3.160.637.871,-	72,56
24.	Forum Lalu Lintas Angkutan Jalan (PHJD)	300.000.000,-	115.307.262,-	38,44

F	PROG. PENINGKATAN KELAIKAN PENGOPERASIAN KENDARAAN BERMOTOR	322.300.100,-	77.707.640,-	24,11
25.	Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor	322.300.100,-	77.707.640,-	24,11
	JUMLAH	7.289.813.420,-	4.837.842.983,-	66,36

Dari tabel diatas ini dapat diketahui bahwa Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan pada Tahun 2020 melaksanakan 6 Program dan 25 Kegiatan dengan jumlah anggaran sebelum pergeseran sebesar Rp.8.571.390.446,-. Namun setelah pergeseran/ refocusing anggaran akibat terjadinya pandemi Corona Virus 19 (Covid-19) ini, Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan hanya dapat melaksanakan 5 Program dan 23 Kegiatan dengan jumlah anggaran sebanyak Rp. 7.289.813.420,- dengan realisasi keuangan sampai 30 Juni 2020 sebesar Rp. 4.837.842.983,- atau sebesar 66,36%.

Program yang tidak dapat dilaksanakan yaitu Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan dengan Kegiatan Pembangunan Fasilitas Transportasi Pedesaan (Penunjang DAK) dengan jumlah anggaran sebelum perubahan sebesar Rp. 60.075.000,-. Kegiatan ini tidak dapat dilanjutkan karena Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan tidak menerima anggaran DAK untuk tahun 2020. Sehingga dana Penunjang DAK ini difocusing pada saat pergeseran.

Sementara itu, untuk Kegiatan Pemilihan dan Pemberian Penghargaan Bidang Perhubungan terpaksa dihentikan. Dengan jumlah anggaran sebelum perubahan sebesar Rp. 108.233.118,- dan setelah perubahan sebesar Rp. 6.464.450,- . Dan beberapa kegiatan lain juga mengalami pengurangan anggaran.

**BAB III**  
**EVALUASI TERHADAP HASIL RENCANA KERJA**  
**DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PESISIR SELATAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2020**

**3.1 Evaluasi Terhadap Hasil Rencana Kerja Perangkat Daerah**

Pelaksanaan evaluasi ditujukan untuk mengidentifikasi sejauhmana kemampuan Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra SKPD, serta mengetahui hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Berikut ini akan diuraikan mengenai kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan kinerja Dinas Perhubungan Triwulan II Tahun Anggaran 2020 serta progres pencapaian kinerja dalam Renstra periode 2016-2021 sehingga dapat teridentifikasi sampai sejauh mana Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan telah melaksanakan program dan kegiatannya.

Realisasi keuangan sampai dengan 30 Juni 2020 (Triwulan II) ini sebesar Rp. 4.837.842.983,- dengan persentase capaian sebesar 66,36%. Sementara itu untuk capaian kinerja RPJMD 60,72 % (rendah) dan capaian keuangan RPJMD sebesar 56,87 % (rendah).

Sesuai dengan daftar terlampir :

Lampiran

EVALUASI TERHADAP HASIL RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN PESISIR SELATAN  
TRIWULAN I TAHUN 2020

No	Sasaran	Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome/Output)	Target RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan pada Tahun 2021		Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan sampai dengan RKPd Tahun Lalu (2019)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Berjalan (2020) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPd tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2019 (%)		SKPD Penanggung Jawab				
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		III		IV		13			14 = 7 +13		15 = 14/6 X 100 %	
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 +13		15 = 14/6 X 100 %		16
			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB																						
			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB PELAYANAN DASAR																						
IX			URUSAN PERHUBUNGAN			90.407.918.819		42.552.472.268		8.511.315.446		2.414.110.346		-		-		-		2.414.110.346		44.966.382.614			
1			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	tersedianya pelayanan administrasi perkantoran (bin)	69.43	7.845.354.500	48	3.547.115.373	12	775.713.028	3	187.874.094	-	-	-	-	-	-	3.00	187.874.094	51	3.734.989.467	73.46	47.61	Dinas Perhubungan
			Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	72	458.693.000	48	417.298.422	12	108.000.000	3	26.381.014							3.00	26.381.014	51	443.679.436	70.83	96.73	
			Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	72	1.307.900.000	48	580.965.500	0	-									-	-	48	580.965.500	66.67	44.42	
			Penyediaan jasa administrasi keuangan	tersedianya jasa administrasi keuangan	72	390.400.000	48	409.509.000	12	191.200.000	3	29.980.000							3.00	29.980.000	51	439.489.000	70.83	112.57	
			Penyediaan jasa kebersihan kantor	tersedianya jasa kebersihan kantor	72	276.581.000	48	127.783.500	12	44.268.928	3	6.832.941							3.00	6.832.941	51	134.616.441	70.83	48.67	
			Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja	72	1.307.900.000	48	55.620.500	12	11.010.000	3	2.100.000							3.00	2.100.000	51	57.720.500	70.83	4.41	
			Penyediaan Alat Tulis Kantor	tersedianya alat tulis kantor	72	249.965.100	48	195.281.239	12	34.977.266	3	2.748.557							3.00	2.748.557	51	198.029.796	70.83	79.22	
			Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	tersedianya barang cetakan dan penggandaan	72	515.573.400	48	211.749.551	12	38.320.232	3	2.255.023							3.00	2.255.023	51	214.004.574	70.83	41.51	
			Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	72	63.682.000	48	49.769.338	12	9.974.232	3	1.857.125							3.00	1.857.125	51	51.626.463	70.83	81.07	
			Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	72	122.400.000	48	55.320.000	12	12.400.000	3	1.160.000							3.00	1.160.000	51	56.480.000	70.83	46.14	
			Penyediaan makanan dan minuman	tersedianya makanan dan minuman	72	202.150.000	48	130.692.700	12	39.265.600	3	6.129.200							3.00	6.129.200	51	136.821.900	70.83	67.68	
			Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	tersedianya biaya perjalanan dinas ke luar daerah	72	1.419.650.000	48	503.599.433	12	173.151.228	3	36.350.400							3.00	36.350.400	51	539.949.833	70.83	38.03	
			Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	tersedianya biaya perjalanan dinas dalam daerah	72	1.062.200.000	48	482.180.000	12	59.000.000	3	13.300.000							3.00	13.300.000	51	495.480.000	70.83	46.65	
			Penunjang operasional perencanaan dan pelaporan	Jumlah laporan (dok)	36	351.260.000	48	249.346.190	12	41.145.542	3	56.779.834							3.00	56.779.834	51	306.126.024	141,67	87,15	

									Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Non PNS	Tersedianya jasa tenaga kerja non PNS (bn)	72	78.000.000	48	65.000.000	0																				48	65.000.000	66.67	83.33				
									Penyediaan Jasa Pemasangan Kantor	Tersedianya Jasa Pemasangan Kantor	36	39.000.000	12	13.000.000	12	13.000.000	3	2.000.000		3,00	2.000.000	15	15.000.000	41.67	38.46																	
2									<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Ketersediaan sarpras pendukung bagi aparatur (bn)</b>	<b>72</b>	<b>2.954.809.000</b>	<b>36,00</b>	<b>2.081.479.847</b>	<b>12</b>	<b>330.940.000</b>	<b>3</b>	<b>52.644.350</b>			<b>52.644.350</b>	<b>36,00</b>	<b>2.134.124.197</b>	<b>50,00</b>	<b>72,23</b>		<b>Dinas Perhubungan</b>															
									Pengadaan meubler	Jumlah Meubler (Paket)	4	800.000.000	1	583.162.170	0	-					1	583.162.170	25,00	72,90																		
									pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor	terpeliharanya gedung kantor	72	508.500.000	48	354.119.527	0	-					48	354.119.527	66,67	69,64																		
									pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional	Terpelihanya kendaraan dinas/ operasional	72	1.646.309.000	48	1.043.228.130	12	330.940.000	3	52.644.350		3	52.644.350	51	1.095.872.480	70,83	66,57																	
									Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas (unit)	2	-	2	100.970.020	0	-			0	-	2	100.970.020	100,00	#DIV/0!																		
									Pembangunan Gedung Kantor	Jumlah Pembangunan Gedung Kantor (unit)	1	-	0	-	0	-				-	-	-	-	-	#DIV/0!																	
3									<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>Persentase peningkatan disiplin aparatur</b>	<b>100</b>	<b>127.833.800</b>	<b>100</b>	<b>127.833.800</b>	<b>-</b>	<b>-</b>					<b>100,00</b>	<b>127.833.800</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>		<b>Dinas Perhubungan</b>																
									Pencapaian Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya (PDH)	Terlaksananya Peningkatan Disiplin Aparatur (paket)	1	127.833.800	1	127.833.800	-	-					1,00	127.833.800	100,00	100,00																		
4									<b>Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan</b>	<b>Persentase sarana perhubungan yang terpenuhi (%)</b>	<b>75</b>	<b>13.926.088.214</b>	<b>36</b>	<b>6.963.044.107</b>	<b>14</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>36,00</b>	<b>6.963.044.107</b>	<b>48,00</b>	<b>50,00</b>		<b>Dinas Perhubungan</b>																
									Pembangunan Fasilitas Transportasi (DAK)	Jumlah sarana dan prasarana yang dibangun/beli (paket)	6	13.926.088.214	4	6.963.044.107	0	-			0	-	4,00	6.963.044.107	66,67	50,00																		
									Pembangunan Fasilitas Transportasi (Penunjang DAK)	terlaksananya kegiatan DAK (Keg)	6	250.000.000	4	109.303.200	1	60.075.000			0	-	4,00	109.303.200	66,67	43,72																		
5									<b>Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ</b>	<b>Persentase alat keselamatan lalu lintas yang berfungsi baik (%)</b>	<b>55.45</b>	<b>1.453.098.400</b>	<b>31.45</b>	<b>587.763.620</b>	<b>8</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>31,45</b>	<b>587.763.620</b>	<b>56,72</b>	<b>40,45</b>		<b>Dinas Perhubungan</b>																	
									Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat Keselamatan Lalu Lintas	Jumlah alat keselamatan lalu lintas yang terpelihara	18	832.713.480	7	277.571.160	0	-	0	-	7,00	277.571.160	38,89	33,33																				
									Rehabilitas Sarana dan Prasarana Fasilitas Pos Retribusi (TPR)	Jumlah pos retribusi (TPR) yang dipelihara (unit)	7	620.384.920	6	310.192.460	0	-	0	-	6,00	310.192.460	85,71	50,00																				
6									<b>Program peningkatan pelayanan angkutan</b>	<b>Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan transportasi (%)</b>	<b>65</b>	<b>9.290.303.860</b>	<b>50,00</b>	<b>4.365.518.196</b>	<b>-</b>	<b>1.377.139.718</b>	<b>-</b>	<b>232.787.465</b>	<b>-</b>	<b>232.787.465</b>	<b>50,00</b>	<b>4.598.305.661</b>	<b>76,92</b>	<b>49,50</b>		<b>Dinas Perhubungan</b>																



																			Pemilihan dan Pemberian Penghargaan Bidang Perhubungan	Jumlah pelajara, sopir, pemilik operator kapal yang dibina, dan penghargaan WTN serta forum LLAJ	2	500.000.000	0	-	1	108.233.118	6.464.450	-	6.464.450	0,00	6.464.450	0,00	1,29	
																			Penunjang Kegiatan WTN	Fasilitas yang dilakukan (keg)	5	1.000.000.000	3	916.396.600	0	-	-	-	-	3,00	916.396.600	60,00	91,64	
																			Pengawasan dan Pengendalian LLAJ	biaya operasional Pengawasan dan Pengendalian LLAJ (bin)	72	1.579.879.500	48	691.110.859	12	169.690.000	30.561.000	3	30.561.000	51,00	721.671.859	70,83	45,68	
																			Pengawasan dan Pengendalian Lalu Lintas Angkutan Laut	biaya operasional Pengawasan dan Pengendalian LLAL (bin)	24	500.000.000	0	-	12	117.067.000	14.944.000	3,00	14.944.000	3,00	14.944.000	12,50	2,99	
																			Operasional pengamanan lalu lintas angkutan laut	Biaya Operasional Pengamanan Lalu Lintas Angkutan Laut (bin)	72	1.220.761.500	48	495.689.203	0	-	-	0	48,00	495.689.203	66,67	40,60		
																			Pembinaan dan penerbitan lalu lintas angkutan laut	Jumlah masyarakat yang dibina	500	712.792.120	2353	333.418.952	0	-	-	0	2353,00	333.418.952	470,60	46,78		
																			Pelajar Pelopor Keselamatan Berlalu lintas	Jumlah Pelajar Yang Dibina	5	345.000.000	3	98.992.062	0	-	-	0	3,00	98.992.062	60,00	28,69		
																			Pemilihan Sopir Teladan (Abyasa)	Fasilitas yang dilakukan (keg)	5	225.000.000	3	74.101.800	0	-	-	0	3,00	74.101.800	60,00	32,93		
																			Operasional Transportasi Pelayanan Pendidikan	Biaya operasional bus sekolah (bin)	72	2.068.836.040	48	1.034.793.320	12	403.222.500	65.953.257	3	65.953.257	51,00	1.100.746.577	70,83	53,21	
																			Pelayanan Terminal dan Perparkiran	Operasional pelayanan terminal dan perparkiran (bin)	72	1.638.034.700	48	721.015.400	12	133.712.100	17.980.700	3	17.980.700	51,00	738.996.100	70,83	45,11	
																			Pelayanan Pemungutan Retribusi Daerah	Operasional pelayanan penerimaan retribusi (bin)	72	2.100.753.040	48	1.262.889.989	12	445.215.000	96.884.058	3	96.884.058	51,00	1.359.774.047	70,83	64,73	
7																			<b>Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan</b>	<b>Persentase sarana perhubungan yang terpenuhi (%)</b>	<b>75</b>	<b>7.300.000.000</b>	<b>36</b>	<b>743.959.000</b>					<b>36,00</b>	<b>743.959.000</b>	<b>48,00</b>	<b>10,19</b>	<b>Dinas Perhubungan</b>	
																			Pembangunan Pagar, Taman Kantor dan Papan Nama (Merk Dinas)	sarana yang dibangun (paket)	1	300.000.000	1	30.000.000	0	-	-	0	1,00	30.000.000	100,00	10,00		
																			Peneamban dan Peneamban Pelabuhan	Pelabuhan/ Dermaga / Tambatan Perahu yang dibangun (unit)	3	7.000.000.000	1	713.959.000	0	-	-	0	1,00	713.959.000	33,33	10,20		
8																			<b>Program Pengendalian Pengamanan Lalu lintas</b>	<b>Persentase pemenuhan sarana pengamanan lalu lintas (%)</b>	<b>75</b>	<b>41.640.000.000</b>	<b>50</b>	<b>19.512.546.687</b>		<b>5.705.222.600</b>	<b>1.894.296.797</b>	<b>0,00</b>	<b>1.894.296.797</b>	<b>50,00</b>	<b>21.406.845.484</b>	<b>66,67</b>	<b>51,41</b>	<b>Dinas Perhubungan</b>
																			Pembangunan Penerangan jalan Umum	Jumlah pembangunan penerangan jalan umum (paket)	60	28.440.000.000	39	9.407.404.704	20	670.000.000	8.406.550	0	8.406.550	39,00	9.415.811.254	65,00	33,11	
																			Pemeliharaan rutin/berkala Penerangan Jalan Umum	Biaya pemeliharaan PJU (bin)	48	13.200.000.000	24	10.105.143.983	12	4.735.222.600	1.859.088.047	3	1.859.088.047	27,00	11.964.232.030	56,25	90,64	
																			Pengadaan Rambu-Rambu RPPJ	Jumlah Rambu RPPJ (paket)	3	250.000.000	1	73.180.100	0	-	-	0	1,00	73.180.100	33,33	29,27		

						Pengadaan dan Pemasangan Alat Keselamatan Lalu Lintas	Jumlah Alat Keselamatan (paket)	6	4.000.000.000	2	293.917.100	0								0				2,00	293.917.100	33.33	7.35		
						Forum Lalu Lintas Angkutan Jalan		2	700.000.000			1	300.000.000		26.802.200					0	26.802.200	0,00	26.802.200	0,00	26.802.200	0,00	3,83		
9						Program peningkatan kelainan pengoperasian kendaraan bermotor	Jumlah Kendaraan yang layak jalan (unit)	533.295	5.870.431.045	115.895	4.623.209.638	7800	322.300.100	1370	46.507.640					1370	46.507.640	117265,00	4.669.717.278	21.99	79.55	Dinas Perhubungan			
						Pelayanan Pengujian Kendaraan bermotor	Jumlah kendaraan yang dilayani (unit)	47.000	2.572.033.840	27.124	1.324.812.433	6200	322.300.100	1370	46.507.640					1370	46.507.640	28494	1.371.320.073	60,63	53,32				
						Pengadaan Alat Uji Mekanis PKB	Jumlah Pengadaan alat uji mekanis PKB	1	3.298.397.205	1	3.298.397.205	0								0		1,00	3.298.397.205	100,00	100,00				
																								Rata-RataCapaian Kinerja			60.19	55.66	
																								Peringkat Kinerja			R	R	

Painan, 1 APRIL 2020

KEPala DINAS PERHUBUNGAN  
KABUPATEN PESIR SELATAN



GUNUNG, M.S.Sos, M.Si

NIP. 20041991011002

### **3.2 Hambatan Dan Kendala Dalam Pencapaian Target Kinerja Yang Telah ditetapkan**

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja pencapaian sasaran ataupun tujuan sebagai penjabaran visi, misi, strategi organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau yang berwenang menerima laporan.

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah.

Dalam hal pencapaian target kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan memiliki hambatan dan kendala-kendala, sebagaimana yang diuraikan dibawah ini :

- a. Kurangnya sarana dan prasarana dalam pelaksanaan kegiatan.
- b. Terbatasnya ketersediaan anggaran Pemerintah Daerah yang berdampak pada belum terpenuhinya fasilitas sarana dan prasarana di bidang Perhubungan serta tidak mencukupinya biaya operasional kegiatan.
- c. Masih terbatasnya tenaga teknis yang berkompeten dalam pelaksanaan kegiatan sesuai bidangnya.

## BAB IV PENUTUP

Laporan evaluasi terhadap hasil Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) ini sebagai acuan untuk mengetahui sejauhmana program kegiatan telah dilaksanakan dan juga merupakan landasan penilaian kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan.

Oleh sebab itu betapapun sederhananya hasil evaluasi ini, namun diharapkan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat serta dapat diimplementasikan ke dalam kinerja yang lebih baik.

Keberhasilan program - program pembangunan ini akan sangat bergantung pada komitmen pimpinan beserta jajarannya serta didukung dengan etos kerja yang tinggi dibarengi dengan disiplin ilmu sesuai dengan tugas yang diemban dalam upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat, menciptakan kebersamaan dan pendayagunaan peran aktif masyarakat dan tokoh masyarakat dalam melakukan tugas pelayanan di bidang perhubungan terutama lalu lintas yang aman, nyaman, lancar, tertib, dan teratur.

Demikian Laporan evaluasi terhadap hasil Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) ini dibuat dalam rangka pertanggung jawaban tugas dan fungsi serta hasil-hasil yang dicapai maupun kegagalan-kegagalan yang dihadapi akan menjadi cambuk bagi kami dalam pelaksanaan tugas kedepan.

Paman, 03 Juli 2020  
Kepala Dinas Perhubungan  
Kabupaten Pesisir Selatan



**Gunawan, S.Sos, M.Si**  
NIP. 197002041991011002